

**PENGARUH PENERIMAAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN MAROS**

Diajukan Oleh
Yuyun Yuningsi
4518011004



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Yuyun Yuningsi

Stambuk/NIM : 4518011004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Tempat Penelitian : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Palipada Palisuri, M.Si


Rafiuddin, SE., M.Si


Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai salah satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan**


Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH


Rafiuddin, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyun Yuningsi
Nim : 4518011004
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul : Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 15 Juni 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Yuyun Yuningsi

4518011004

**PENGARUH PENERIMAAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS**

Oleh :
Yuyun Yuningsi

**Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

ABSTRAK

Yuyun Yuningsi. 2022. Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros, (dibimbing oleh **Drs. Palipada Palisuri, M. Si** dan **Rafiuddin, SE., M.Si**) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) melalui wawancara, dokumentasi dan *Library Research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu berupa data dokumen atau tabel-tabel mengenai realisasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah dan untuk data realisasi pertumbuhan ekonomi di lihat dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dari Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program statistik IBM SPSS versi 25.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapataan Asli Daerah maka dapat berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Maros. (2) Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi

THE EFFECT OF REGIONAL REVENUE ON ECONOMIC GROWTH IN MAROS DISTRICT

**By :
Yuyun Yuningsi**

**Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business,
University of Bosowa**

ABSTRACT

Yuyun Yuningsi. 2022. The Effect of Regional Revenue on Economic Growth in Maros Regency, (supervised by Drs. Palipada Palisuri, M.Si and Rafiuddin, SE., M.Si) Development Economics study program, Faculty of Economics and Business, University of Bosowa.

This study aims to determine and analyze the effect of regional original income and balancing funds on economic growth in Maros Regency. In this study using a quantitative approach with data collection methods, namely Field Research through interviews, documentation and Library Research. The source of data used in this study is secondary data in the form of document data or tables regarding the realization of regional original income and balancing funds obtained from the Regional Finance and Assets Agency and for data on the realization of economic growth seen from the Gross Regional Domestic Product on the basis of prices. 2010 constant was obtained from the Regional Development Agency of Maros Regency. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with IBM SPSS statistical program version 25.0.

The results of the study show that (1) Regional Original Income (PAD) has a positive and significant effect on Economic Growth. So it can be concluded that the higher the Regional Original Income, the positive effect on economic development in Maros Regency. (2) Balancing Fund has a positive but not significant effect on economic growth.

Keywords: Regional Original Income, Balance Fund, Economic Growth

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian yang akan dijadikan pertimbangan pada penelitian selanjutnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak support dan bantuan serta doa dari kedua orang tua Bapak Tamrin S.Sos dan Ibu Narmiati serta beberapa orang penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Bapak Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
3. Ibu Dr.Hj.Herminawati Abu Bakar SE.,MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

4. Kepada Bapak Drs. Palipada Palisuri M.Si selaku dosen pembimbing satu atas waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rafiuddin SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar dan sebagai dosen pembimbing dua yang senantiasa mengarahkan, memberikan saran dan perbaikan dengan sabar sehingga proses penelitian dan penyusunan skripsi dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Segenap staf dan karyawan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang juga banyak membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 18 dan seperjuangan Angkatan 18 yang membantu dan memotivasi agar terselesaikannya karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 15 Juni 2022

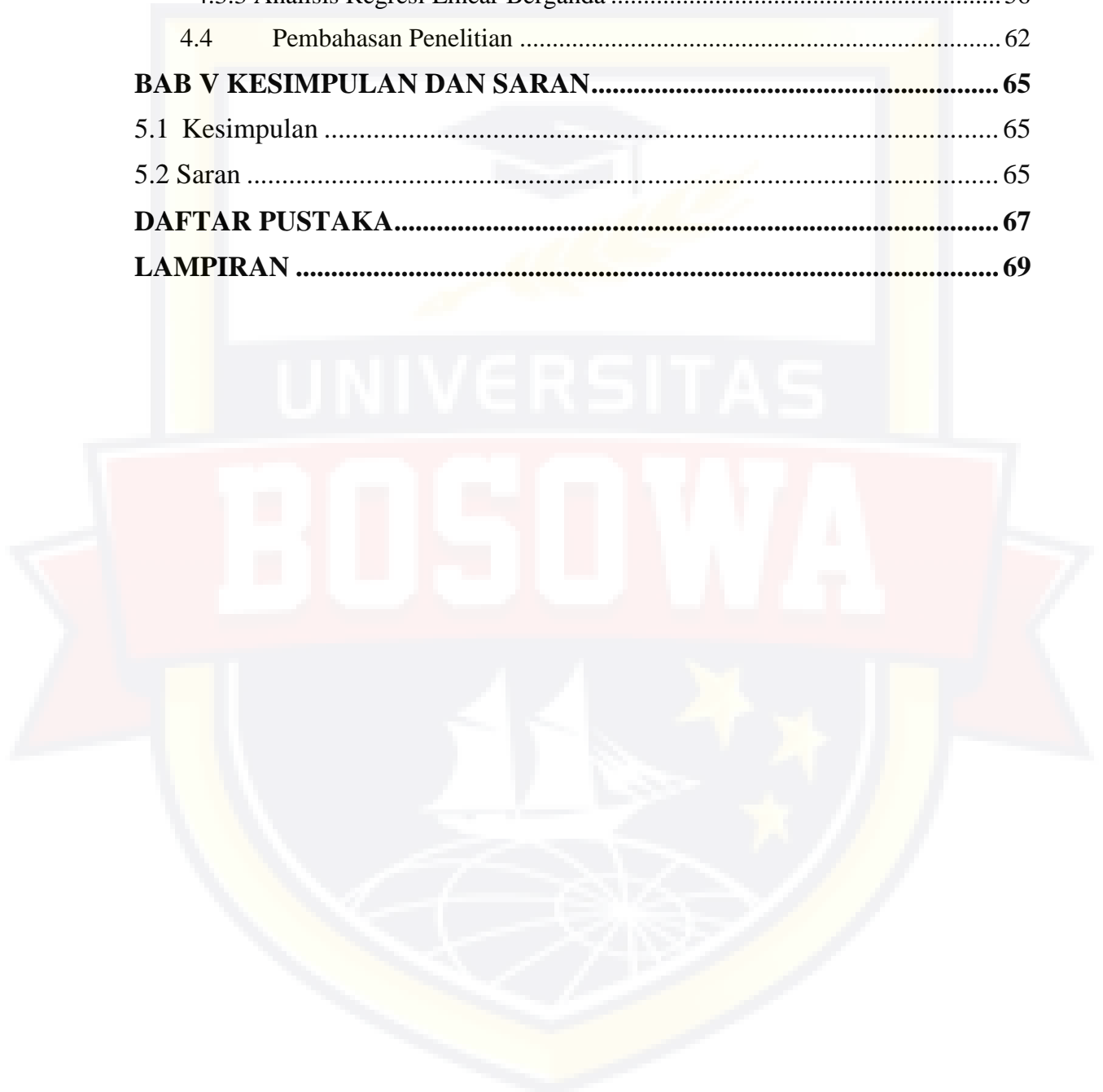
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.1.1.1 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.1.2 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.2 Pengertian Pendapatan Daerah.....	15
2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.4 Pengertian Dana Perimbangan	19
2.1.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH).....	20
2.1.4.2 Dana Alokasi Umum	21
2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus.....	21
2.1.5 Hubungan Antar Variabel.....	22

2.2	Kerangka Pikir	24
2.3	Hipotesis	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		26
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	26
3.2.1	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	26
3.2.2	Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	27
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3.1	Jenis Data	27
3.3.2	Sumber Data.....	28
3.4	Metode Analisis	28
3.4.1	Analisis Deskriptif	28
3.4.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	29
3.5	Definisi Operasional	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian	36
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Maros	36
4.1.2	Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	38
4.1.3	Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah	38
4.1.3.1	Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah	38
4.1.3.2	Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah	38
4.1.4	Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	38
4.1.5	Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah	40
4.1.5.1	Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	40
4.1.5.2	Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	40
4.1.6	Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	41
4.1.7	Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian.....	42
4.2	Deskriptif Data.....	46
4.3	Hasil Analisis Data	49
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	49

4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda	56
4.4 Pembahasan Penelitian	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	69

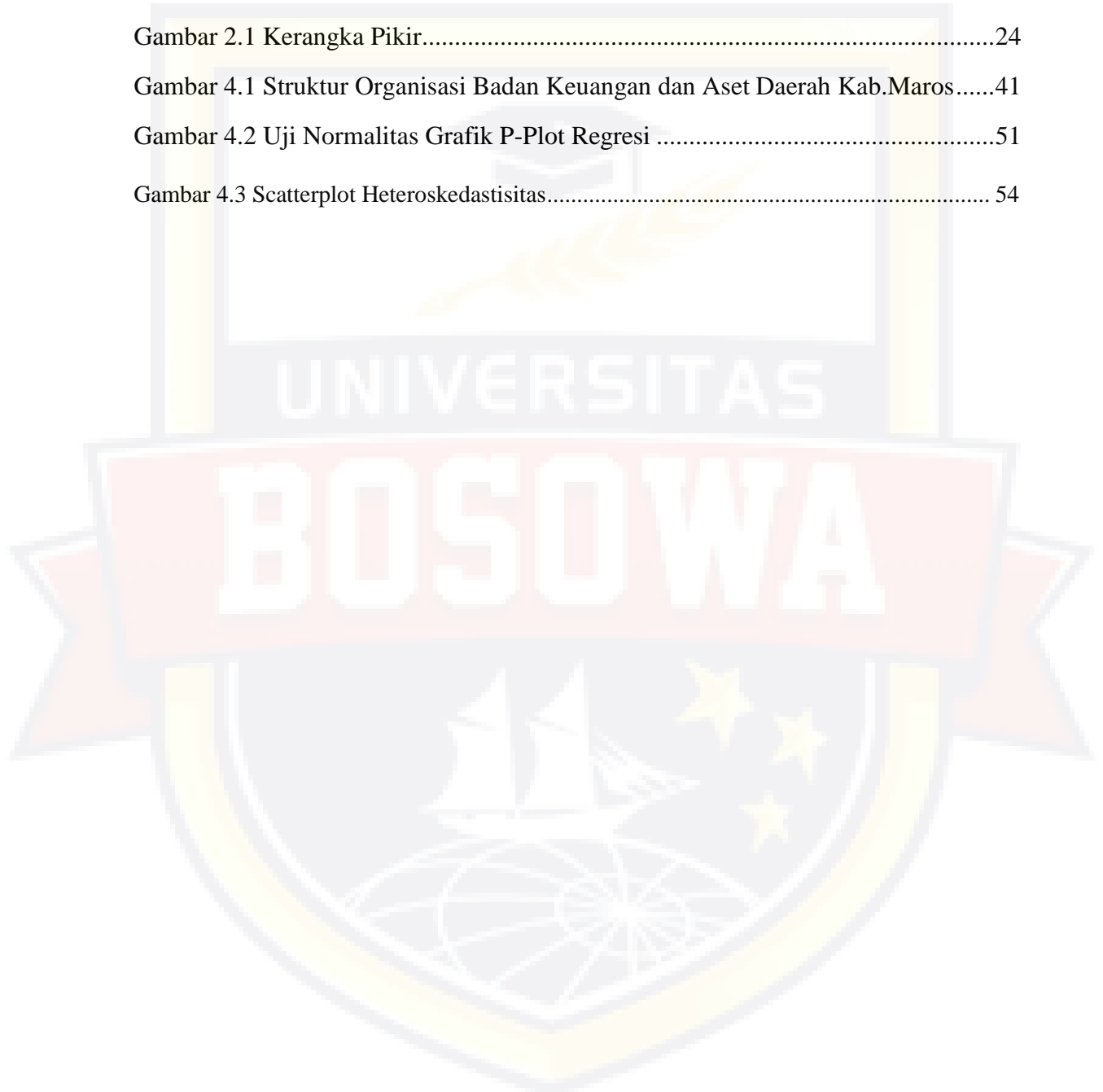


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Tahun 2015-2020.....	4
Tabel 4.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2012-2020	47
Tabel 4.2 Data Realisasi PAD Kabupaten Maros Tahun 2012-2020.....	48
Tabel 4.3 Data Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Maros Tahun 2012-2020 ..	49
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.5 Uji Normalitas <i>Kolmogrov-Smirnov Test</i>	52
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4.8 Uji <i>Run-Test</i>	55
Tabel 4.9 Uji Regresi Linear Berganda.....	56
Tabel 4.10 Uji Parsial.....	58
Tabel 4.11 Uji Simultan	60
Tabel 4.12 Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Maros.....	41
Gambar 4.2 Uji Normalitas Grafik P-Plot Regresi	51
Gambar 4.3 Scatterplot Heteroskedastisitas.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan sentralistik yang terjadi di zaman orde baru di mana kontrol pemerintah pusat mematikan kemandirian daerah, mengakibatkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satu penyebab melambatnya perkembangan ekonomi di wilayah ini karena kurangnya diskresi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya sendiri. Sistem desentralisasi dianggap lebih efektif untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik di daerah sebab otoritas lokal memiliki akses informasi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan yakni dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian dimana barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan dalam periode waktu tertentu. Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga kesempatan kerja penuh dapat dicapai terus menerus. Setiap negara paling minimum harus berusaha agar tingkat pertumbuhan ekonominya melebihi dari tingkat pertumbuhan penduduk, agar pendapatan per kapita atau taraf kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, maka disinilah peran pemerintah daerah mampu menggali potensi yang dimiliki daerah agar menjadi sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah bebas membentuk kebijakan serta merancang keuangan pemerintah sehingga dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sebab tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Kebebasan dalam merancang keuangan daerahnya, belanja daerah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) artinya rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dirancang serta disetujui bersama DPRD dimana, APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten atau kota dapat mengetahui keuangan daerahnya sehingga kinerja keuangan dapat ditingkatkan dengan demikian, pelayanan di setiap kabupaten atau kota yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat serta pelayanan publik semakin maksimal. Peningkatan PAD diharapkan mampu mengurangi defisit anggaran dan juga dapat meningkatkan pembangunan di daerah, sehingga anggaran belanja daerah dapat lebih besar.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah khususnya di Kabupaten Maros pemerintah setempat dapat mengatur serta mengelola potensi sumber daya alam dan keunggulan lokal yang dimiliki sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai tolak ukur mampu tidaknya daerah tersebut

menyediakan pembiayaan bagi daerahnya sendiri, walaupun otonomi tidak dapat diartikan sebagai untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah namun besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah sangat menunjang kelancaran pembangunan.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk menunjang pembiayaan kegiatan-kegiatannya, sehingga sering kali menjadi penyebab ketimpangan fiskal antar daerah. Hal tersebut dapat terjadi sebab tidak seimbangnya antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Oleh sebab itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut Pemerintah Pusat mengalokasikan dana dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah agar dapat melaksanakan desentralisasi.

Dana yang dimaksud yaitu Dana Perimbangan di mana terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, khususnya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama penyediaan Dana Perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memperbaiki sistem perpajakan, dan memperbaiki efisiensi fiskal yang rendah.

TABEL 1.1
DATA PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH dan DANA PERIMBANGAN 2015 - 2020

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2015	141.487.686	759.792.905	10.916.729,1	8,44
2	2016	165.023.869	1.067.130.874	11.953.999,2	9,50
3	2017	194.999.054	903.546.699	12.768.318,4	6,81
4	2018	219.844.780	988.704.969	13.558.738,1	6,19
5	2019	203.706.048	966.759.310	13.726.282,7	1,24
6	2020	311.275.815	987.802.524	12.233.660,1	-10,87

Sumber : BPS Kab.Maros

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros dominan terjadi peningkatan di mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 311.275.815 sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 141.487.686, namun dalam periode yang sama pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif, dapat dilihat besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan Kabupaten Maros.

Dalam periode yang sama pada tabel 1.1 Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Maros juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dana perimbangan terbesar diterima pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.067.130.874 sedangkan Dana Perimbangan terkecil yang diterima pada tahun 2015 sebesar Rp. 759.792.905.

Berdasarkan data sementara yang telah dikumpulkan oleh penulis, dapat dilihat bahwa besarnya Dana Perimbangan yang diterima tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Kabupaten Maros, sedangkan berdasarkan uraian diatas bahwa dengan adanya bantuan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi. Adapun fenomena yang dikutip dari makassar.sindonews.com yang diberikan oleh Najwi Limonu (2021) dimana menurut Muh.Alwi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) pertumbuhan ekonomi Maros di tahun 2019 berada di angka 1,24% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga minus 10,87% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah setempat dapat menjadikan bahan atau tolak ukur disetiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan daerah serta pengelolaan keuangan khususnya pemerintah daerah Maros.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan penulis tentang seberapa berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di daerah Maros.

3. Bagi Universitas Bosowa Makassar

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan serta referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang mungkin tertarik pada penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Menguraikan perihal teori-teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis agar menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut. Kerangka teori ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian.

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur perkembangan kegiatan perekonomian di mana barang dan jasa yang diproduksi masyarakat mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Menurut Hamzah (2009), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi skala nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan sebab menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara riil keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun.

Sukirno (2010) menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

M. P Todaro memaparkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional semakin besar.(Todaro, 2000).

Jadi, disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan kenaikan *output* perkapita atau kenaikan Produk Domestik Regional Bruto dalam jangka waktu yang cukup lama dan dibandingkan dengan waktu sebelumnya serta barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2.1.1.1 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut Todaro (2004), secara umum sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi ialah terdapat investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.

Menurut Sukirno (2010) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peran ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni :

- a) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
- c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi ialah pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2010) pengeluaran pemerintah ialah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD. Dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.

Besarnya penerimaan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ialah agar menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu Pertumbuhan Ekonomi.

Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011) berpendapat faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan penduduk sebab penduduk yang semakin bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menamabah produksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supartoyo dkk (2013), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja merupakan faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Ekspor juga dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, sebab apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan sebab ekspor meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari permintaan barang luar negeri di dalam negeri.

Berdasarkan beberapa pendapatan peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yaitu investasi pemerintah, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, ekspor dan desentralisasi.

2.1.1.2 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Dengan menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mengetahui Pertumbuhan Ekonomi di suatu negara. Di tingkat regional disebut dengan Produk domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga konstan (Supartoyo dan Tatum, 2013:6).

Menurut Imamul Arifin (2007) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (region), baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara garis besar ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. Metode Langsung, terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan yaitu :

a) Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun sedangkan Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

b) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi

di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian ini sudah termasuk dalam komponen penyusutan dan pajak tak langsung.

c) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa diproduksi.

2) Metode Tidak Langsung

a) Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun yang dinilai dengan harga di tahun bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB/*output*) dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB

menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor.

b) Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa didasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan atau dianalisis oleh para ekonom adalah LPE harga konstan, sebab menggambarkan pertumbuhan produksi secara riil di masing-masing sektor.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LPE} = \frac{\text{PDRB}_{(n,k,i)} - \text{PDRB}_{(n-1,k,i)}}{\text{PDRB}_{(n-1,k,i)}} \times 100\%$$

Keterangan :

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

k = atas dasar harga konstan

n = Tahun berjalan

i = Sektor/Sub Sektor

n-1 = Tahun sebelumnya

2.1.2 Pengertian Pendapatan Daerah

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah ialah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Menurut Syam (2017) Pendapatan adalah pajak atas pendapatan atau penerimaan individu, perusahaan, perkebunan, atau tanah, surat-surat berharga atau kepercayaan.

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Pendapatan Asli Daerah
 2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

b. Pembiayaan

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jadi, Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dianggarkan dalam APBD yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang sifatnya menambah ekuitas dana.

2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 menyatakan, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017:119).

Pendapatan asli daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan daerah sehingga upaya penggalan sumber pendapatannya, pemerintah tidak melakukan distorsi perekonomian.

2.1.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Hasil Pajak Daerah

Menurut Haerunnisa (2018) Pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada Negara yang tidak mendapatkan jasa secara langsung dari Negara dan dipakai untuk membiayai keperluan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Pajak Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Peraturan pelaksanaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupate / Kota), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Haerunnisa, 2018). Jenis retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Contoh retribusi daerah yaitu:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara BUMN.

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Pendapatan lain-lain yang sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potong ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.

2.1.4 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Selain untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan sistem transfer dana dari pemerintah yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan nasional, baik vertikal maupun horisontal dan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang

pengelolaan keuangan negara agar dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Badrudin dan Manek, 2016).

Rincian pendapatan yang termasuk dalam dana perimbangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu dana perimbangan bersumber dari APBN terbagi atas tiga yaitu : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dalam pasal ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak yaitu :

1. Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana yang diberikan setiap satu tahun sekali kepada pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Transfer dana ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat dengan leluasa menggunakannya untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik untuk keperluan masyarakat.

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (PP Nomor 55 Tahun 2005).

Dana alokasi khusus disediakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan bagi daerah kabupaten penghasil penerima sektor kehutanan. Dengan ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2014 daerah memperoleh alokasi sebesar 40% dari penerimaan APBN sektor kehutanan. Bagi daerah yang akan menggunakan dana alokasi khusus diwajibkan menyiapkan dana pendamping minimal 10% dari penerimaan umum APBD. Jika dilihat dari besarnya jumlah DAK, perannya tidak terlalu signifikan namun jika dikaitkan dengan fungsi belanja dengan upaya

pemilihan kondisi peran DAK menjadi sangat strategis untuk membiayai investasi jangka waktu menengah yang nantinya akan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan pemerintah daerahnya.

2.1.5 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, sebab melalui sektor ini dapat dianalisa sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan meningkatkan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini menyarankan kepada pemerintah daerah agar lebih berfokus ke pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal agar menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada hanya mengeluarkan perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.

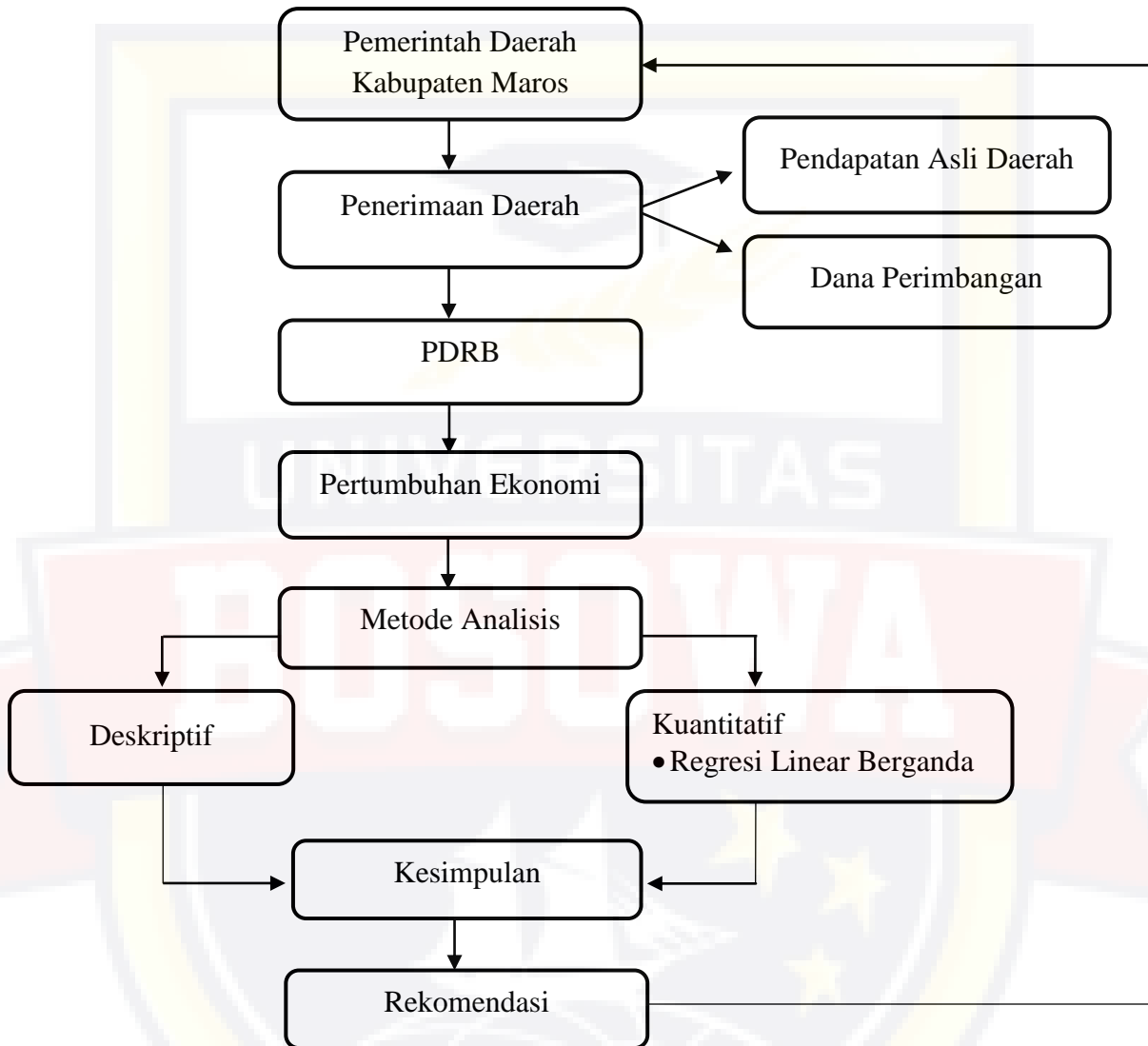
Hariato (2007) mengemukakan PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Tambunan (2006) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

2. Hubungan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana perimbangan adalah dana dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah perubahan keadaan perekonomian suatu daerah secara terus-menerus ke arah yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu.

Melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan dalam segala aspek termasuk perekonomiannya. Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) diharapkan dapat digunakan dengan seefektif serta seefisien mungkin oleh pemerintah setempat dengan melibatkan masyarakat dalam membangun daerah. Tujuannya agar mengurangi ketimpangan serta kesenjangan pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.3 Hipotesis

1. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros.

2. Diduga bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan lamanya di mulai Februari sampai dengan bulan Maret 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar (Sugiarti dkk, 2020:39).

Adapun metode yang digunakan penelitian langsung yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu, mengadakan tanya jawab secara langsung dengan staff di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros atau pihak-pihak yang bersangkutan mengenai masalah yang di bahas.

2. Dokumentasi,

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji peristiwa yang sudah berlalu yaitu berupa data sekunder. Adapun data yang digunakan yaitu mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros periode 2012-2020.

3.2.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan, yaitu pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Teori yang diperoleh dari buku-buku maupun jurnal dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan yang digunakan untuk mendukung data lainnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
2. Dana kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang dapat di ukur atau dihitung secara langsung. Sifat dari data ini adalah runtun waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa pegawai instansi.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen maupun dalam bentuk data-data ataupun tabel-tabel yang berhubungan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan selama enam tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, serta data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik simpulan penelitian (Sugiyono,2018). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah proses menganalisis dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, data-data bersumber dari objek penelitian dan bahan-bahan lainnya, yang kemudian mengolah data tersebut sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Sugiyono, 2011) mendefinisikan analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan atau agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menguji uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Berikut tahapan pengujian asumsi klasik :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah dalam regresi variabel dependen dan independen mendekati distribusi normal. Ada dua cara untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat grafik P-P Plot dan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Pada grafik P-P Plot sebuah data dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik menyebar disekitaran garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Syarat uji multikolinieritas yaitu dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi, sebaliknya jika *Tolerance* $< 0,10$ maka model regresi terjadi multikolinieritas. Jika nilai VIF $< 10,00$ diartikan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi, sebaliknya jika nilai VIF $> 10,00$ maka model regresi terjadi multikolinieritas

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai varians yang sama diantara anggota grub tersebut. Apabila dalam analisis grafik titik-titik menyebar dan tidak berbentuk suatu pola yang jelas serta tersebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian dengan autokorelasi bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi sering ditemukan pada sample data *time series*. Adapun kriteria untuk

pengambilan keputusan terjadinya autokorelasi dengan pengujian *Durbin Watson*

yaitu :

- a. Jika angka DW lebih kecil dari -2 ($DW < -2$) berarti terjadi autokorelasi positif
- b. Jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi
- c. Jika angka DW lebih besar dari +2 ($DW > +2$) berarti terjadi autokorelasi negative

Selain melihat dari nilai *Durbin Watson* dapat dilakukan pengujian *Run Test* agar lebih meyakinkan peneliti dalam melanjutkan uji regresi linear berganda. Adapun syarat dari pengujian *run test* ini yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi
- b. Jika nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menerangkan pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB. Persamaan analisis linear berganda secara umum untuk menguji Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

menjadi

$$\text{Ln}Y = \text{Ln}\beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + e$$

Model regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = \text{Ln}\beta_0 + \beta_1 \text{Ln}PAD_1 + \beta_2 \text{Ln}DP_2 + e$$

Keterangan :

Ln Y = Pertumbuhan Ekonomi

Ln PAD = Pendapatan Asli Daerah

LnDP = Dana Perimbangan

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

e = Error Term

Adapun aplikasi olah data statistik yang akan digunakan yaitu menggunakan SPSS versi 25.

c. Uji Hipotesis

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh keterkaitan antara (PAD dengan Y, DP dengan Y) yang dapat dilihat dari besarnya t hitung terhadap t tabel.

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen yaitu PAD dan DP terhadap variabel dependen yaitu Y, sehingga dapat diketahui apakah dugaan yang ada dapat diterima/ditolak. Dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Kriteria penerimaan pengujian yaitu:

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.)

- a. Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan perbandingan F hitung dan F tabel

- a. Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari PAD dan DP terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y), sehingga dapat diketahui apakah dugaan dapat diterima/ditolak.

Kriteria pengambilan keputusan :

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.)

- a. Jika nilai Sig. $<$ probabilitas 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai Sig. $>$ probabilitas 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel

- a. Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur presentase sumbangan variabel independen yaitu PAD dan DP yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y). Koefisien determinasi (R^2) antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti jika $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel, bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin baik pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila R^2 semakin kecil mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji koefisien korelasi (R) digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu :

0,00 – 0,199 = sangat rendah

0,20 – 0,399 = rendah

0,40 – 0,599 = sedang

0,60 – 0,799 = kuat

0,80 – 1,000 = sangat kuat

3.5 Definisi Operasional

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Maros dalam periode tertentu dan dibandingkan dengan

periode sebelumnya serta barang dan jasa yang diproduksi masyarakat juga meningkat sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah Kabupaten Maros itu sendiri sehingga pengelolaan sumber-sumber pendapatan sangat penting dilakukan sebab semakin tinggi PAD maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan lebih baik.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah termasuk Kabupaten Maros untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka desentralisasi. Dengan adanya transfer dari pusat ini dapat mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antar pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, terdapat nama lain daerah ini yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut sangat melekat di masyarakat Kabupaten Maros dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,11 km² yang terdiri dari 14 kecamatan dan 103 Desa/kelurahan. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar dengan jarak kedua kota berkisaran 30 km dan terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peran penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian

utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Demikian pula dengan sarana transportasi udara terbesar di Kawasan Timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan.

Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan yang terdiri atas 80 desa dan 23 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Turikale, kecamatan yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas : Turikale, Maros Baru, Lau, Bontoa, Mandai, Marusu, Tanralili, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Kondisi desa di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 103 desa/kelurahan terdapat 62 desa sudah mencapai predikat Desa Swasembada, 26 desa merupakan Desa Swadaya dan 15 desa mencapai tingkat Desa Swakarya. Diharapkan desa-desa swakarya tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa swasembada dalam waktu yang akan datang. Adapun usaha pemerintah Kabupaten Maros dalam pembangunan bertujuan untuk meletakkan sendi-sendi kehidupan desa dan kelurahan

yaitu masyarakat desa yang bercukupan material, spiritual serta akhlak menuju masyarakat adil dan merata guna terwujudnya desa pancasila.

4.1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman Maros Sulawesi Selatan. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

4.1.3 Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah

4.1.3.1 Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah

“Maros lebih sejahtera, religius dan berdaya saing”.

4.1.3.2 Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan dasar, penegakan hukum, nilai budaya dan keagamaan secara inklusif.
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan penataan wilayah secara merata sesuai kondisi geografis wilayah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

4.1.4 Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sejarah singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang awalnya dinamakan Dinas Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang terdiri dari 1 kepala dinas, 1 sekretariat dan 4 bidang teknis. Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat dan 3 bidang teknis.

Pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari kepala badan, sekretariat dan 3 bidang teknis.

Tahun 2016 berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 kepala badan, 1 sekretariat dan 4 bidang teknis. Tahun 2019, Peraturan Bupati Maros Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, yang berarti Badan Keuangan Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) yang membedakan yaitu terdapat 5 bidang teknis.

Pada tahun 2022 berubah nama menjadi Badan Keuanga dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja yang terdiri dari 1 kepala badan, 1 sekretariat dan 4 bidang teknis.

4.1.5 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

4.1.5.1 Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yaitu merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, menentukan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

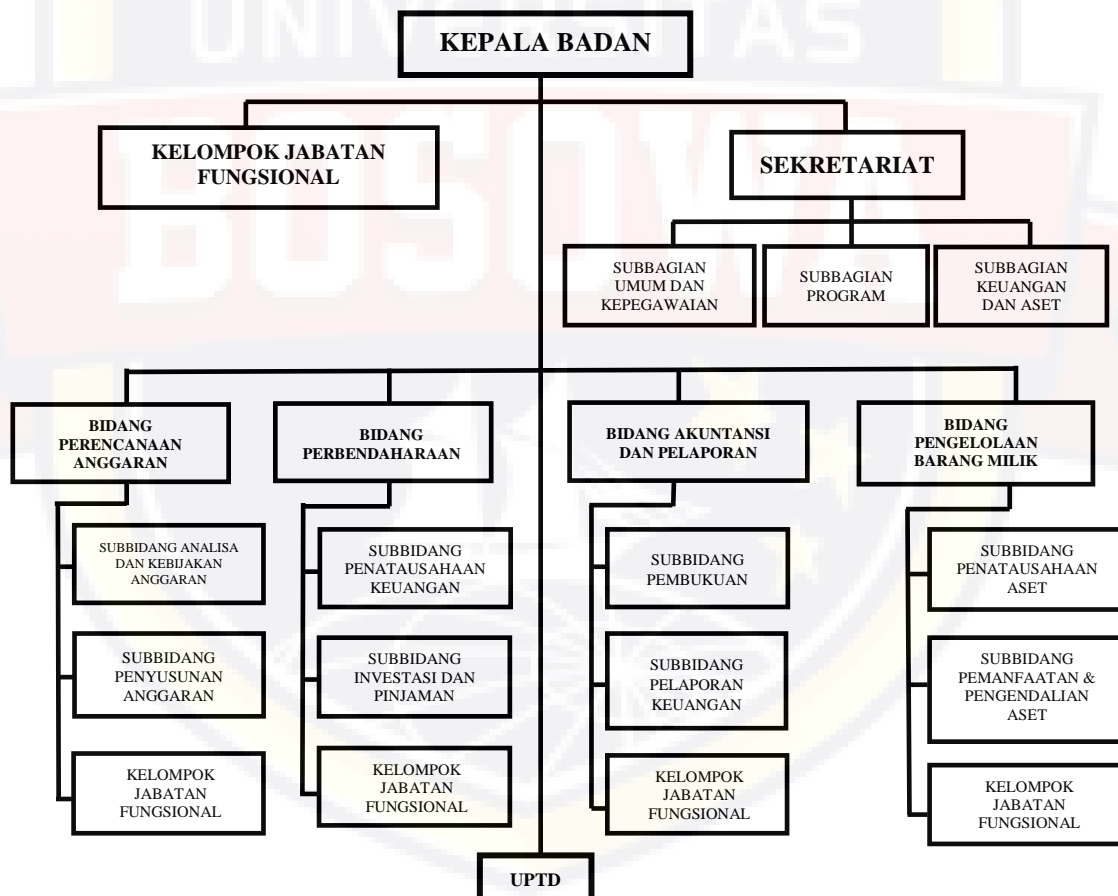
4.1.5.2 Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keuangan dan aset daerah
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Merumuskan program kerja di Bidang Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah
6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag dan sub bidang
8. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
9. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4.1.6 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

BAGAN/STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Maros**

4.1.7 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian

- a. Tugas pokok Kepala Badan yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas membantu kepala Daerah.
- b. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset serta penyusunan program dalam lingkungan Badan. Adapun fungsi dari sekretariat yaitu :
 1. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, dan aset kepegawaian;
 2. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, aset dan kepegawaian;
 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, aset dan kepegawaian;
 4. Melaksanakan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan mengenai tugas dan fungsinya.

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melakukan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan evaluasi laporan kinerja.
- e. Subbagian Keuangan dan Aset memiliki tugas membantu Sekretariat dalam penatausahaan administrasi keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang keuangan serta aset.
- f. Bidang Perencanaan Anggaran memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan dibidang analisis kebijakan serta penyusunan anggaran. Dalam melaksanakan tugas, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1. Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang analisa dan kebijakan serta penyusunan anggaran;
 - 2. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Subbidang Analisa dan Kebijakan Anggaran memiliki tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan analisis dan kebijakan anggaran.

- h. Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dibidang penyusunan anggaran.
- i. Bidang Perbendaharaan memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, investasi, pinjaman dan bantuan. Adapun fungsi Bidang Perbendaharaan yaitu:
 - 1. Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pelaksanaan dibidang penatusahaan keuangan, investasi, pinjaman dan bantuan;
 - 2. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- j. Subbidang Penatausahaan Keuangan memiliki tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dibidang penatusahaan keuangan.
- k. Subbidang Investasi dan Pinjaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan investasi, pinjaman dan bantuan.
 - 1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

2. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
4. Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

m. Subbidang Pembukuan memiliki tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan *accounting* melalui pencatatan dan penyajian transaksi keuangan dibidang pembukuan.

n. Subbidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan pelaporan keuangan.

o. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan, penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset dibidang pengelolaan barang milik negara. Adapun fungsi di bidang ini yaitu :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset;
2. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program dibidang penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset;

3. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dibidang penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset;
 4. Mengumpulkan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penatausahaan serta pemanfaatan dan pengendalian aset;
- p. Subbidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penatausahaan aset dibidang pengelolaan barang milik daerah.
- q. Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset memiliki tuga membantu kepala bidang dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

4.2 Deskriptif Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi periode 2012–2020 yang akan dianalisis pengaruhnya menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi spss versi 25.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan *output* berupa barang dan jasa yang menggambarkan perkembangan perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat

diartikan juga sebagai kenaikan kapasitas produksi perekonomian suatu daerah yang dilihat dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

TABEL 4.1
DATA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2012-2020

No	Tahun	PDRB (Rp)	Pertumbuhan (%)	Ln PDRB
1	2012	9.044.451.000	11,14	22,93
2	2013	9.612.782.100	6,28	22,99
3	2014	10.067.224.600	4,73	23,03
4	2015	10.930.835.750	8,58	23,11
5	2016	11.953.999.200	9,50	23,20
6	2017	12.768.318.400	6,81	23,27
7	2018	13.558.747.500	6,19	23,33
8	2019	13.726.282.600	1,24	23,34
9	2020	12.233.282.600	-10,87	23,23

Sumber: Data diolah 2022, Bappeda Maros, Data Diolah SPSS

Pada tabel 4.1 dapat di lihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,14% dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -10,87%.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang meliputi segala penerimaan daerah yang melalui rekening kas umum daerah, yang sifatnya menambah pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Berikut adalah data realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Maros tahun 2012 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.2
DATA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2012-2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Ln Pendapatan Asli Daerah
1	2012	60.364.408.988	24,82
2	2013	79.513.862.571	25,10
3	2014	118.267.910.133	25,50
4	2015	141.487.685.605	25,68
5	2016	165.487.675.628	25,83
6	2017	194.999.053.694	26,00
7	2018	219.813.979.862	26,12
8	2019	248.747.244.304	26,24
9	2020	219.096.914.071	26,11

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun (2012-2020), Data diolah SPSS

Pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2019 senilai Rp. 248.747.244.304 sedangkan Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2012 sebanyak Rp. 60.364.408.988.

Dana perimbangan adalah transfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi.

Berdasarkan tabel 4.3 berikut menunjukkan data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Maros dari tahun 2012 hingga 2020. Dalam data tersebut menunjukan

mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana transfer pemerintah pusat tertinggi terjadi pada tahun 2016 senilai Rp. 1.067.130.874.537 dan transfer pemerintah terendah pada tahun 2012 sebanyak Rp. 541.142.617.873.

TABEL 4.3
DATA REALISASI DANA PERIMBANGAN
KABUPATEN MAROS TAHUN 2012-2020

No	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Ln Dana Perimbangan
1	2012	541.142.617.873	27,02
2	2013	626.203.965.763	27,16
3	2014	713.906.816.093	27,29
4	2015	759.792.905.384	27,36
5	2016	1.067.130.874.537	27,70
6	2017	903.546.699.475	27,53
7	2018	988.704.968.934	27,62
8	2019	979.207.172.107	27,61
9	2020	882.646.034.275	27,51

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun (2012-2020), Data Diolah SPSS

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang ada sebagai data pendukung dari hasil analisis kuantitatif. Variabel yang dideskripsikan yaitu variabel dependen dan independen berupa data nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi.

TABEL 4.4
HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln PAD	9	24.82	26.24	25.7102	.48864
Ln DP	9	27.02	27.70	27.4213	.22913
Ln Pertumbuhan Ekonomi	9	22.93	23.34	23.1593	.15185
Valid N (listwise)	9				

Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa n atau jumlah data disetiap variabel yaitu 9. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variable X_1 memiliki nilai minimum 24,82, nilai maksimum 26,24, nilai rata-rata 25,7102 dan standar deviasi yaitu 0,48864
- b. Dana Perimbangan (DP) sebagai variabel X_2 memiliki nilai minimum 27,02 nilai maksimum 27,70 nilai rata-rata 27,4213 dan standar deviasi yaitu 0,22913
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y atau variabel dependen memiliki nilai minimum 22,93, nilai maksimum 23,34, nilai rata-rata 23,1593 dan standar deviasi yaitu 0,15185

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji data dengan regresi linear berganda salah satu syarat yang harus terpenuhi yaitu melalui uji asumsi klasik agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini layak untuk diolah ketahap selanjutnya. Pengujian asumsi klasik yang

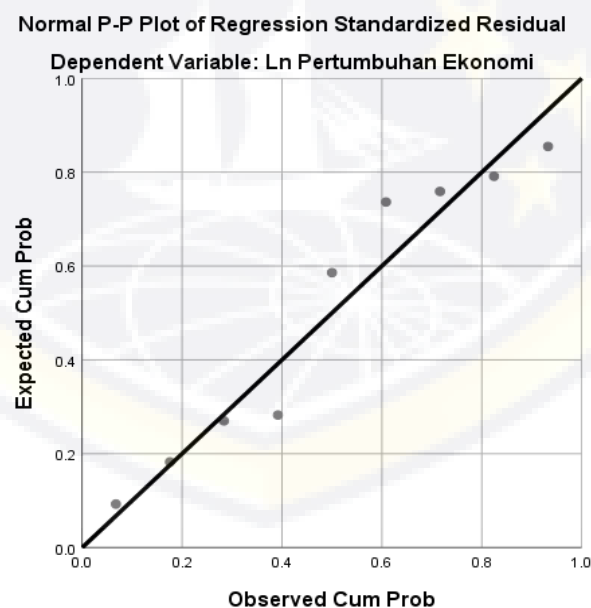
harus terpenuhi yaitu berdistribusi normal, non-Autokorelasi, non-Multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dan melihat grafik P-P Plot. Pada grafik P-P Plot sebuah data dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik menyebar disekitaran garis diagonal dan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan berdistribusi normal jika nilai Sig. > 0,05 sebaliknya jika nilai Sig. < 0,05 maka dikatakan tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta menyesuaikan arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan model regresi telah sesuai dengan asumsi normalitas.

GAMBAR 4.2
HASIL UJI NORMALITAS GRAFIK P-P PLOT REGRESI



Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

TABEL 4.5
HASIL UJI NORMALITAS *KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized		
Residual		
N		9
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.03751962
Most Extreme	Absolute	.212
Differences	Positive	.191
	Negative	-.212
Test Statistic		.212
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.5 Hasil uji normalitas berdasarkan uji statistik One Sample *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah 0,200 yang berarti lebih besar dari 0.05 yang artinya berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi, sebaliknya jika *Tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10,00 maka model regresi terjadi multikolienaritas.

TABEL 4.6
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Model	Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Std. Error	Tolerance	VIF
	B				
1 (Constant)	12.997		2.913		
Ln PAD	.235		.080	.152	6.585
Ln DP	.150		.172	.152	6.585

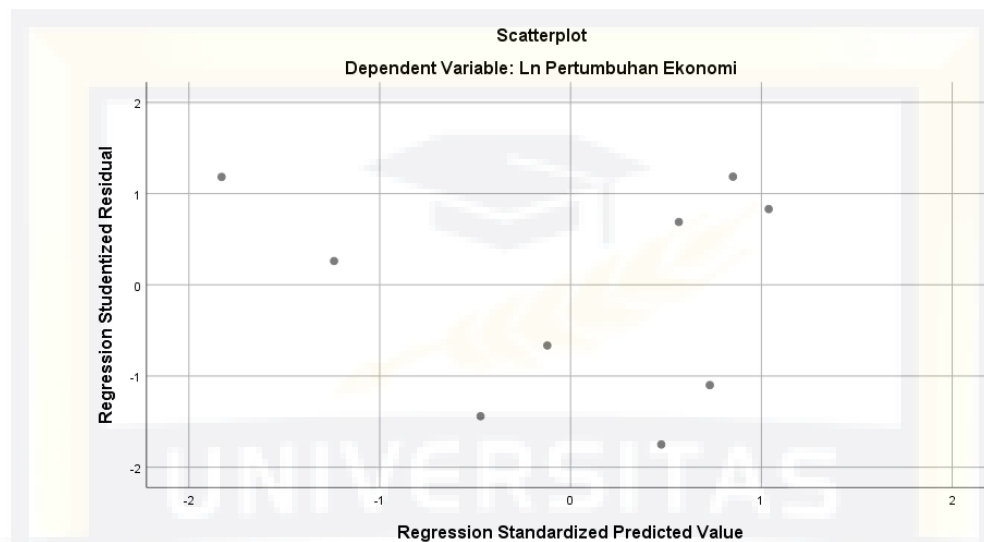
a. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.6 dapat di lihat bahwa nilai *Tolerance* pada variabel X_1 yaitu PAD dan variabel X_2 yaitu DP dengan nilai sama 0,152 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari kedua variabel independen yaitu $6,585 < 10,00$ sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas (variabel independen).

4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Apabila dalam analisis grafik titik-titik menyebar dan tidak berbentuk suatu pola yang jelas serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

GAMBAR 4.3
HASIL SCATTERPLOT HETEROSKEDASTISITAS



Sumber: Data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak berbentuk suatu pola yang jelas dan tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dari hal tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi sering ditemukan pada sample data *time series*. Adapun kriteria untuk pengambilan keputusan terjadinya autokorelasi dengan pengujian *Durbin Watson* yaitu :

- d. Jika angka DW lebih kecil dari -2 ($DW < -2$) berarti terjadi autokorelasi positif
- e. Jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi
- f. Jika angka DW lebih besar dari +2 ($DW > +2$) berarti terjadi autokorelasi negatif

TABEL 4.7
HASIL UJI AUTOKORELASI DURBIN-WATSON

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.939	.919	.04332	1.266

a. Predictors: (Constant), Ln DP, Ln PAD

b. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Pada tabel 4.7 menunjukkan nilai Durbin-Watson yaitu 1,266 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi sebab nilai Durbin-Watson berada di antara nilai -2 dan +2.

Pada hasil pengujian autokorelasi dengan uji *run test* tabel 4.8 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,495 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu dengan periode sebelumnya oleh sebab itu pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

TABEL 4.8
HASIL UJI RUN TEST

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00940
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	4
Z	-.683
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.495

a. Median

Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dimana untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi semuanya memenuhi syarat dalam melakukan uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel X_1 dan Dana Perimbangan (DP) sebagai variabel X_2 terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel dependent periode 2012-2020 di Kabupaten Maros.

TABEL 4.9
HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.997	2.913		4.462	.004
Ln PAD	.235	.080	.756	2.921	.027
Ln DP	.150	.172	.227	.876	.415

a. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Dari analisis pada tabel 4.9 dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Ln Y} = 12,997 + 0,235 \text{ LnPAD} + 0,150 \text{ LnDP} + e$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Koefisien untuk variabel X_1 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif sehingga setiap perubahan variabel independent PAD akan berpotensi menaikkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel dependent. Apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan senilai 1%, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan meningkat senilai 0,235% dengan asumsi Dana Perimbangan bernilai konstan.
- b. Koefisien untuk variabel X_2 yaitu Dana Perimbangan (DP) bernilai positif sehingga setiap perubahan variabel independent DP akan berpotensi pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel dependent. Apabila variabel Dana Perimbangan (DP) mengalami peningkatan senilai 1%, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat senilai 0,150% dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah bernilai konstan.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independent dan satu variabel dependent. Pengujian dalam penelitian ini memiliki dua hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya dan menggunakan regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Kabupaten Maros
- H_2 : Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi

4.3.4.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu :

- Jika nilai Sig. < probabilitas 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau di lihat dari t hitungnya.
- Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

TABEL 4.10
HASIL UJI T PARSIAL

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	12.997	2.913		4.462	.004	
Ln PAD	.235	.080	.756	2.921	.027	
Ln DP	.150	.172	.227	.876	.415	

a. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Berdasarkan pada tabel 4.10 hasil uji parsial dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = T_{\text{tabel}} (\alpha ; (n-k))$$

$$= T_{\text{tabel}} (0,05 ; 9-3)$$

$$= T_{\text{tabel}} (0,05 ; 6)$$

$$= T_{\text{tabel}} 1,94318$$

1. Hasil uji hipotesis variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) diperoleh nilai $T_{hitung} = 2,921$ lebih besar dari nilai T_{tabel} yaitu 1,94318 selain itu nilai signifikansi PAD $0,027 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
2. Hasil uji hipotesis Dana Perimbangan (DP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) diperoleh nilai $T_{hitung} = 0,876$ lebih kecil dari nilai T_{tabel} yaitu 1,94318 selain itu nilai signifikansi DP $0,415 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

4.3.4.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- c. Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- c. Jika nilai F hitung $> F$ tabel maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

TABEL 4.11
HASIL UJI SIMULTAN

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.173	2	.087	46.137	.000 ^b
	Residual	.011	6	.002		
	Total	.184	8			

a. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Ln DP, Ln PAD

Sumber: Data diolah. SPSS Versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji simultan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus : $F_{\text{tabel}} = F(k ; n-k-1)$

Keterangan: k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel penelitian

$$F_{\text{tabel}} = F(2 ; 9-2-1)$$

$$= F(2 ; 6)$$

$$= 5,14$$

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.13 tersebut dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 46,137 dan F_{tabel} sebesar 5,14 . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka secara simultan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi), selain itu nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).

4.3.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur persentase sumbangan variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap variasi naik turunnya variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y). Nilai koefisien determinasi dikatakan baik jika nilai di atas 0,5 sebab nilai ini berkisaran antara 0 sampai dengan 1.

TABEL 4.12
HASIL UJI KOEFISIEN KORELASI dan KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.939	.919	.04332

a. Predictors: (Constant), Ln DP, Ln PAD

b. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui nilai koefisien determinasi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) dapat dilihat pada *R Square* sebesar 0,939 atau dalam persen senilai 93,9% sedangkan 6,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,969 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

4.4 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah peneliti lakukan, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara spesifik pada pembahasan mengenai hasil uji hipotesis yaitu sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros yang menunjukkan nilai $T_{hitung} 2,921 > T_{tabel} 1,9438$ selain itu nilai signifikan PAD $0,027 < 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros maka **Hipotesis Pertama Diterima.**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017). Sehingga dengan terkelolanya sumber-sumber pendapatan di daerah dengan baik maka dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Margaretha Dine Poring (2019) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang Periode Tahun 2005-2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang.

4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (DP) berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros yang menunjukkan nilai $T_{hitung} 0,876 < T_{tabel} 1,94318$ dan nilai signifikan Dana Perimbangan (DP) $0,415 > 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros maka **Hipotesis Kedua Ditolak**. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh daerah tidak dipergunakan secara langsung untuk pembangunan ekonomi sebagai contohnya Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja rutin yaitu pengeluaran untuk penyelenggaraan atau pemeliharaan pemerintahan sehari-hari. Belanja rutin juga seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom dan lain-lain. Dana Alokasi Umum yang diterima ini tidak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian dapat dikaitkan dengan teori Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan terhadap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Badrudin dan Manek, 2016). Adanya transfer gratis dari pemerintah pusat sebab tidak seimbangnya antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sehingga semakin tinggi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat maka ketergantungan pemerintah daerah lebih dominan terhadap transfer dari pusat tersebut dan membuat kemandirian keuangan pemerintah daerah menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dikemukakan oleh Beki Gustama Putra (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros pada periode 2012-2020. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dilihat dari uji hipotesis secara parsial nilai signifikansinya 0,027 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Variabel Dana Perimbangan diuji secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros sebab nilai signifikansinya 0,415 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kedua di tolak.
3. Pengujian secara simultan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dilihat dari nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Maros agar lebih menggali dan mengelolah potensi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah agar dapat meningkatkan pembangunan dan kemandirian keuangan daerah sehingga dapat meminimalisir transfer dari pusat.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti penerimaan daerah diharapkan menambah variabel independen agar lebih lengkap dan menambah data *time series* sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariefiantoro, Teguh, Saddewisasi, Wyati. (2011). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang. **Jurnal Dinamika Sosbud** Vol. 13 No. 2. Diakses tanggal 27 Oktober 2021
- Carunia, Mulya Firdaus. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haerunnisa. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar*. *Economics Bosowa*. Diakses Tanggal 1 Juni 2022
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Hamzah, Ardi. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur: Studi Pada 38 Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006*. **Jurnal Balitbange Depdagri**. Vol. 9 (3): 156-176. Diakses tanggal 17 Februari 2022.
- Imamul, A. (2007). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo.
- Manek, Marinus & Rudy Badruddin, (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Stimykp*. Vol.17 No,2 : 81-98. Diakses Tanggal 17 Februari 2022
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada
- Supartoyo, Y.H & Tatu. J. (2013). *The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia*. Buletin ekonomi moneter dan perbankan. Diakses Tanggal 24 Januari 2022

- Syam, Nur Fitri. (2017). ***Kontribusi Taman Wisata Alam Bantimurung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Economics Bosowa***. Diakses Tanggal 24 Maret 2022
- Tambunan, Tulus. (2006). ***Pembangunan Ekonomi Dunia ketiga***. Jakarta : Erlangga.
- Todaro dkk. (2004). ***Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga***. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael. (2000). ***Pembangunan Ekonomi Dunia ketiga***. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Alokasi Khusus
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Alokasi Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah Retribusi
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Dana Bagi Hasil yang berasal dari Pajak.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah



**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012						
Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	K
1	2	3	4	5	6	
1.	PENDAPATAN DAERAH	732.458.565.688,00	728.015.704.781,10	4.442.860.906,90	(4.442.860.906,90)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.338.150.000,00	60.364.408.987,73	9.973.741.012,27	(9.973.741.012,27)	
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	34.057.440.000,00	35.807.402.919,00	(1.749.962.919,00)	1.749.962.919,00	
1.1.2.	Masil Retribusi Daerah	24.600.710.000,00	18.708.454.662,22	5.892.255.337,78	(5.892.255.337,78)	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.830.000.000,00	2.091.406.533,19	(261.406.533,19)	261.406.533,19	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.850.000.000,00	3.757.144.873,32	6.092.855.126,68	(6.092.855.126,68)	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	644.408.319.708,00	651.751.404.583,37	(7.343.084.875,37)	7.343.084.875,37	
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	532.320.191.708,00	541.142.617.873,00	(8.822.426.165,00)	8.822.426.165,00	
1.2.1.1.	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.181.056.916,00	34.242.245.928,00	(9.061.189.012,00)	9.061.189.012,00	
1.2.1.2.	b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	1.403.367.792,00	1.164.604.945,00	238.762.847,00	(238.762.847,00)	
1.2.1.3.	c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	455.829.227.000,00	455.829.227.000,00	-	-	
1.2.1.4.	d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	49.906.540.000,00	49.906.540.000,00	-	-	
1.2.2.	Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya	83.844.881.000,00	84.136.806.000,00	(291.925.000,00)	291.925.000,00	
1.2.2.1.	a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	
1.2.2.2.	b. Dana Penyesuaian	83.844.881.000,00	84.136.806.000,00	(291.925.000,00)	291.925.000,00	
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	28.243.247.000,00	26.471.980.710,37	1.771.266.289,63	(1.771.266.289,63)	
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.243.247.000,00	26.471.980.710,37	1.771.266.289,63	(1.771.266.289,63)	
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.712.095.980,00	15.899.891.210,00	1.812.204.770,00	(1.812.204.770,00)	
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	17.712.095.980,00	15.899.891.210,00	1.812.204.770,00	(1.812.204.770,00)	
	JUMLAH	732.458.565.688,00	728.015.704.781,10	(4.442.860.906,90)	(4.442.860.906,90)	
2.	BELANJA DAERAH	729.575.688.896,00	667.738.324.273,16	61.837.364.622,84	61.837.364.622,84	
2.1.	BELANJA OPERASI	570.593.124.337,00	526.102.863.535,16	44.490.260.801,84	44.490.260.801,84	
2.1.1.	1. Belanja Pegawai	442.600.020.696,00	423.497.884.843,00	19.102.135.853,00	19.102.135.853,00	
2.1.2.	2. Belanja Barang dan Jasa	121.393.103.641,00	96.913.230.085,16	24.479.873.555,84	24.479.873.555,84	
2.1.3.	3. Belanja Bunga	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.1.4.	4. Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5.	5. Belanja Hibah	5.000.000.000,00	4.741.740.000,00	258.260.000,00	258.260.000,00	
2.1.6.	6. Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	950.008.607,00	549.991.393,00	549.991.393,00	
2.1.7.	7. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2.	BELANJA MODAL	145.482.564.559,00	131.298.626.895,00	14.183.937.664,00	14.183.937.664,00	
2.2.1.	Tanah	4.400.000.000,00	1.202.027.500,00	3.197.972.500,00	3.197.972.500,00	
2.2.2.	Peralatan dan mesin	27.432.346.214,00	22.871.768.750,00	4.560.577.464,00	4.560.577.464,00	
2.2.3.	Gedung dan Bangunan	53.461.377.000,00	49.889.759.509,00	3.571.617.491,00	3.571.617.491,00	
2.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	54.949.801.345,00	52.460.983.336,00	2.488.818.009,00	2.488.818.009,00	
2.2.5.	Aset Tetap lainnya	5.239.040.000,00	4.874.087.800,00	364.952.200,00	364.952.200,00	
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	213.580.000,00	1.786.420.000,00	1.786.420.000,00	

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	K
1	2	3	4	5	6	
1.	PENDAPATAN DAERAH	920.121.245.914,00	879.546.874.920,47	40.574.370.993,53	(40.574.370.993,53)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.732.500.000,00	79.513.862.570,72	23.218.637.429,28	(23.218.637.429,28)	
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	46.399.000.000,00	42.059.791.208,00	4.339.208.792,00	(4.339.208.792,00)	
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	27.751.000.000,00	26.720.832.395,26	1.030.167.604,74	(1.030.167.604,74)	
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	2.711.181.876,00	1.788.818.124,00	(1.788.818.124,00)	
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	24.082.500.000,00	8.022.057.091,46	16.060.442.908,54	(16.060.442.908,54)	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	783.337.427.354,00	782.339.597.789,75	997.829.564,25	(997.829.564,25)	
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	624.604.905.354,00	626.203.965.763,00	(1.599.060.409,00)	1.599.060.409,00	
1.2.1.1.	a. Dana Bagi Hasil Pajak	31.659.719.538,00	33.352.871.864,00	(1.693.152.326,00)	1.693.152.326,00	
1.2.1.2.	b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.356.353.816,00	1.262.261.899,00	94.091.917,00	(94.091.917,00)	
1.2.1.3.	c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	540.383.322.000,00	540.383.322.000,00	-	-	
1.2.1.4.	d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	51.205.510.000,00	51.205.510.000,00	-	-	
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	129.101.922.000,00	125.798.922.000,00	3.303.000.000,00	(3.303.000.000,00)	
1.2.2.1.	a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	
1.2.2.2.	b. Dana Penyesuaian	129.101.922.000,00	125.798.922.000,00	3.303.000.000,00	(3.303.000.000,00)	
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	29.630.600.000,00	30.336.710.026,75	(706.110.026,75)	706.110.026,75	
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.630.600.000,00	30.336.710.026,75	(706.110.026,75)	706.110.026,75	
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.051.318.560,00	17.693.414.560,00	16.357.904.000,00	(16.357.904.000,00)	
1.3.1.	Pendapatan Hibah	12.000.000.000,00	-	12.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)	
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	22.051.318.560,00	17.693.414.560,00	4.357.904.000,00	(4.357.904.000,00)	
	JUMLAH	920.121.245.914,00	879.546.874.920,47	(40.574.370.993,53)	(40.574.370.993,53)	
2.	BELANJA DAERAH	929.246.171.956,00	871.051.679.383,00	58.194.492.573,00	58.194.492.573,00	
2.1.	BELANJA OPERASI	632.565.408.141,00	595.593.945.073,00	36.971.463.068,00	36.971.463.068,00	
2.1.1.	1. Belanja Pegawai	474.671.093.398,00	465.233.058.282,00	9.438.035.116,00	9.438.035.116,00	
2.1.2.	2. Belanja Barang dan Jasa	149.811.514.743,00	124.537.117.434,00	25.274.397.309,00	25.274.397.309,00	
2.1.3.	3. Belanja Bunga	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.1.4.	4. Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.5.	5. Belanja Hibah	5.057.800.000,00	3.431.260.750,00	1.626.539.250,00	1.626.539.250,00	
2.1.6.	6. Belanja Bantuan Sosial	2.525.000.000,00	2.392.508.607,00	132.491.393,00	132.491.393,00	
2.1.7.	7. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
2.2.	BELANJA MODAL	280.180.763.815,00	259.777.474.954,00	20.403.288.861,00	20.403.288.861,00	
2.2.1.	Belanja Tanah	4.417.385.000,00	2.740.586.000,00	1.676.799.000,00	1.676.799.000,00	
2.2.2.	Belanja Peralatan dan mesin	40.458.813.004,00	36.918.273.050,00	3.540.539.954,00	3.540.539.954,00	
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	105.531.344.020,00	94.848.747.576,00	10.682.596.444,00	10.682.596.444,00	
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.217.402.891,00	121.234.940.778,00	3.982.462.113,00	3.982.462.113,00	
2.2.5.	Belanja Aset Tetap lainnya	1.411.692.000,00	996.669.000,00	415.023.000,00	415.023.000,00	
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	3.144.126.900,00	3.038.258.550,00	105.868.350,00	105.868.350,00	
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	680.560.000,00	819.440.000,00	819.440.000,00	

Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2015

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 JULI 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2015	Realisasi 2015 (Audited)	(%)	Realisasi 2014
1	PENDAPATAN	V.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.1.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.1.1.a.1)	68.301.000.000,00	Rp 64.898.605.475,05	95,02	57.503.299.764,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.1.1.a.2)	68.680.809.800,00	Rp 50.622.503.178,88	73,71	40.438.066.771,99
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.1.1.a.3)	6.500.000.000,00	Rp 6.267.571.943,98	96,42	3.677.383.952,00
6	Lain-lain PAD yang sah	V.1.1.a.4)	52.703.500.000,00	Rp 19.699.005.007,54	37,38	16.649.159.644,71
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		196.185.309.800,00	141.487.685.605,45	72,12	118.267.910.132,70
8				Rp -		
9	PENDAPATAN TRANSFER	V.1.1.b				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	V.1.1.b.1)	22.774.498.000,00	Rp 17.341.562.150,00	76,14	17.934.033.736,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.1.1.b.2)	2.812.473.000,00	Rp 1.840.245.234,00	65,43	2.947.670.357,00
13	Dana Alokasi Umum	V.1.1.b.3)	645.209.768.000,00	Rp 645.209.768.000,00	100,00	614.598.482.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	V.1.1.b.4)	95.399.030.000,00	Rp 95.401.330.000,00	100,00	78.426.630.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		766.195.769.000,00	759.792.905.384,00	99,16	713.906.816.093,00
16				Rp -		
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	Rp -		0,00
19	Dana Penyesuaian	V.1.1.b.5)	149.285.757.000,00	Rp 149.285.757.000,00	100,00	106.766.878.000,00
20	Dana Desa	V.1.1.b.6)	23.469.704.000,00	Rp 23.469.704.000,00	100,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		172.755.461.000,00	172.755.461.000,00	100,00	106.766.878.000,00
22				Rp -		
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.1.1.b.7)	55.480.768.815,00	Rp 51.388.884.608,40	92,62	42.762.771.524,25
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.1.1.b.8)	13.575.408.000,00	Rp 7.589.979.600,00	55,91	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		69.056.176.815,00	58.978.864.208,40	85,41	42.762.771.524,25
27	Total Pendapatan Transfer		1.008.007.406.815,00	991.527.230.592,40	98,37	863.436.465.617,25
28				Rp -		
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.1.1.c				
30	Pendapatan Hibah		10.000.000.000,00	Rp 932.000.000,00	9,32	1.068.000.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	Rp -		0,00
32	Pendapatan Lainnya		0,00	Rp -		13.484.207.700,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		10.000.000.000,00	932.000.000,00	9,32	14.552.207.700,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.214.192.716.615,00	1.133.946.916.197,85	93,39	996.256.583.449,95
35				Rp -		
36	BELANJA	V.1.2				
37	BELANJA OPERASI	V.1.2.a				
38	Belanja Pegawai	V.1.2.a.1)	531.820.082.352,00	Rp 513.917.540.062,00	96,63	460.755.017.243,00
39	Belanja Barang Jasa	V.1.2.a.2)	243.935.337.503,00	Rp 178.456.909.316,00	73,16	159.905.796.295,00
40	Bunga	V.1.2.a.3)	0,00	Rp -		0,00
41	Subsidi		0,00	Rp -		0,00
42	Hibah	V.1.2.a.4)	60.901.476.450,00	Rp 57.047.147.873,00	93,67	24.222.134.502,00
43	Bantuan Sosial	V.1.2.a.5)	450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	100,00	3.797.498.222,00
44	Jumlah Belanja Operasi		837.106.896.305,00	749.871.597.251,00	89,58	648.680.446.262,00
45				Rp -		
46	BELANJA MODAL	V.1.2.b				
47	Belanja Tanah	V.1.2.b.1)	8.777.082.925,00	Rp 6.993.328.488,00	79,68	3.859.381.762,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	V.1.2.b.2)	46.699.391.400,00	Rp 39.299.476.604,00	84,15	46.956.230.460,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	V.1.2.b.3)	135.549.606.185,00	Rp 119.256.011.812,00	87,98	113.049.272.080,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.1.2.b.4)	168.016.181.505,00	Rp 157.823.831.433,00	93,93	130.424.943.817,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.1.2.b.5)	3.752.645.500,00	Rp 2.320.650.500,00	61,84	745.770.000,00
52	Belanja Aset Lainnya	V.1.2.b.5)	0,00	Rp -		2.786.801.230,00
53	Jumlah Belanja Modal		362.794.907.515,00	325.693.298.837,00	89,77	297.822.399.349,00
54				Rp -		
55	BELANJA TAK TERDUGA	V.1.2.c				
56	Belanja Tak Terduga		1.500.000.000,00	Rp 383.500.000,00	25,57	372.650.000,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.500.000.000,00	383.500.000,00	25,57	372.650.000,00
58	JUMLAH BELANJA		1.201.401.803.820,00	1.075.948.396.088,00	89,56	946.875.495.611,00

Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2016

LAMPIRAN I. : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(SETELAH AUDIT)

No	URAIAN	REF	2016		%	REALISASI 2015
			ANGGARAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.A	78.551.000.000,00	70.683.640.411,95	89,98	64.898.605.475,05
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.A.1	64.503.500.000,00	56.145.613.762,43	87,04	50.622.503.178,88
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.A.2	10.314.224.400,00	10.314.224.366,00	100,00	6.267.571.943,98
6	Lain-lain PAD yang sah	7.5.1.1.1.A.3	22.750.000.000,00	28.344.197.087,78	124,59	19.699.005.007,54
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		176.118.724.400,00	165.487.675.628,16	93,96	141.487.685.605,45
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.1.B				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		22.387.967.000,00	23.149.679.642,00	103,40	17.341.562.150,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.101.573.000,00	4.400.802.227,00	86,26	1.840.245.234,00
13	Dana Alokasi Umum		704.125.166.000,00	704.125.166.000,00	100,00	645.209.768.000,00
14	Dana Alokasi Khusus		412.020.694.000,00	335.455.226.668,00	81,42	95.401.330.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.143.635.400.000,00	1.067.130.874.537,00	93,31	759.792.905.384,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.1.1.B.2				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian		6.409.727.000,00	6.568.247.000,00	102,47	149.285.757.000,00
20	Dana Desa		52.677.296.000,00	52.677.296.000,00	100,00	23.469.704.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		59.087.023.000,00	59.245.543.000,00	100,27	172.755.461.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.1.B.2				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		66.307.705.041,00	53.811.282.310,60	81,15	51.388.884.608,40
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		13.587.404.802,00	5.841.576.800,00	42,99	7.589.979.600,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		79.895.109.843,00	59.652.859.110,60	74,66	58.978.864.208,40
27	Total Pendapatan Transfer		1.282.617.532.843,00	1.186.029.276.647,60	92,47	991.527.230.592,40
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.1.C				
30	Pendapatan Hibah		23.049.973.217,00	23.049.973.219,00	100,00	932.000.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		23.049.973.217,00	23.049.973.219,00	100,00	932.000.000,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.481.786.230.460,00	1.374.566.925.494,76	92,76	1.133.946.916.197,85
35						
36	BELANJA					
37	BELANJA OPERASI	7.5.1.1.2.A				
38	Belanja Pegawai		596.572.587.828,00	588.796.479.859,00	98,70	527.259.136.234,00
39	Belanja Barang Jasa		254.479.240.854,00	208.790.027.125,00	82,05	165.115.313.144,00
40	Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah		16.502.258.800,00	13.755.903.200,00	83,36	57.047.147.873,00
43	Bantuan Sosial		300.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
44	Jumlah Belanja Operasi		867.854.087.482,00	811.342.410.184,00	93,49	749.871.597.251,00
45						
46	BELANJA MODAL	7.5.1.1.2.B				
47	Belanja Tanah		5.518.809.275,00	1.448.770.000,00	26,25	6.993.328.488,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin		50.800.888.517,00	45.224.411.782,00	89,02	39.299.476.604,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan		80.395.899.817,00	69.220.926.880,00	86,10	119.256.011.812,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		324.693.123.705,00	305.796.283.790,00	94,18	157.823.831.433,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya		749.859.000,00	749.859.000,00	100,00	2.320.650.500,00
52	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja Modal		462.158.580.314,00	422.440.251.452,00	91,41	325.693.298.837,00
54						
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.1.2.C				
56	Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	665.121.750,00	66,51	383.500.000,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	665.121.750,00	66,51	383.500.000,00
58	JUMLAH BELANJA		1.331.012.667.796,00	1.234.447.783.386,00	92,75	1.075.948.396.088,00

Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2018




PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(SETELAH AUDIT)

Dalam Rp

No	URAIAN	REF	2018		%	REALISASI 2017
			ANGGARAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.A	134.073.149.058,00	117.382.100.076,00	87,55	102.810.769.324,60
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.A.1	21.795.000.000,00	21.050.163.668,09	96,58	17.844.884.895,26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.A.2	11.522.540.366,00	11.522.540.365,00	100,00	11.528.460.497,05
6	Lain-lain PAD yang sah	7.5.1.1.1.A.3	105.615.485.130,00	69.859.175.753,32	66,14	62.814.938.977,10
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		273.006.174.554,00	219.813.979.862,41	80,52	194.999.053.694,01
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.1.B				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		22.089.849.000,00	20.964.916.412,00	94,91	18.428.199.488,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.791.729.000,00	4.435.813.555,00	92,57	3.584.067.600,00
13	Dana Alokasi Umum		697.947.111.000,00	697.947.111.000,00	100,00	691.755.951.000,00
14	Dana Alokasi Khusus		272.588.109.000,00	265.357.127.967,00	97,35	189.798.481.387,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		997.416.798.000,00	988.704.968.934,00	99,13	903.546.699.475,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.1.1.B.2				
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian		35.750.000.000,00	35.750.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
20	Dana Desa		73.737.621.000,00	74.083.395.000,00	100,47	67.073.813.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		109.487.621.000,00	109.833.395.000,00	100,32	74.573.813.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.1.B.2				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		56.786.824.051,00	52.429.397.124,00	92,33	59.827.620.855,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		7.300.000.000,00	6.614.873.946,00	90,61	5.121.897.600,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		64.086.824.051,00	59.044.271.070,00	92,13	64.949.518.455,00
27	Total Pendapatan Transfer		1.170.991.243.051,00	1.157.582.635.004,00	98,85	1.043.070.030.930,00
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.1.C				
30	Pendapatan Hibah		46.959.400.000,00	43.302.276.758,00	92,21	61.718.389.372,00
31	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
32	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		46.959.400.000,00	43.302.276.758,00	92,21	61.718.389.372,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.490.956.817.605,00	1.420.698.891.624,41	95,29	1.299.787.473.996,01
35						
36	BELANJA					
37	BELANJA OPERASI	7.5.1.1.2.A				
38	Belanja Pegawai		536.748.742.300,00	527.059.728.865,00	98,19	520.993.826.776,00
39	Belanja Barang Jasa		307.347.736.022,00	276.138.910.275,33	89,85	249.838.770.338,00
40	Bunga		-	-	-	-
41	Subsidi		-	-	-	-
42	Hibah		40.368.587.000,00	35.789.328.965,00	88,66	22.415.396.450,00
43	Bantuan Sosial		6.870.000.000,00	2.040.000.000,00	29,69	6.570.000.000,00
44	Jumlah Belanja Operasi		891.335.065.322,00	841.027.968.105,33	94,36	799.817.993.564,00
45						
46	BELANJA MODAL	7.5.1.1.2.B				
47	Belanja Tanah		9.302.109.587,00	2.108.080.000,00	22,66	3.553.582.555,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin		83.014.416.453,00	59.199.494.159,00	71,31	42.844.980.968,88
49	Belanja Gedung dan Bangunan		164.237.918.926,00	150.499.433.810,00	91,64	132.768.181.150,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		223.368.923.750,00	197.703.776.550,00	88,51	179.190.609.842,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya		2.409.500.000,00	2.301.909.936,00	95,53	815.021.000,00
52	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
53	Jumlah Belanja Modal		462.332.868.716,00	411.812.694.455,00	89,07	359.172.375.515,88
54						
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.1.2.C				
56	Belanja Tak Terduga		2.000.000.000,00	707.650.000,00	35,38	203.000.000,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		2.000.000.000,00	707.650.000,00	35,38	203.000.000,00
58	JUMLAH BELANJA		1.355.667.934.038,00	1.253.548.312.560,33	92,47	1.159.193.369.079,88

Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020

 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
PENDAPATAN		1.456.868.058.842,00	1.381.411.565.488,04	94,82	1.463.260.373.758,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		292.857.252.818,00	219.096.914.071,44	74,81	248.747.244.303,67
Pendapatan Pajak Daerah	A.1.a.1)	144.727.000.000,00	110.723.082.095,00	76,50	134.893.941.585,00
Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.a.2)	19.337.000.000,00	15.239.082.951,97	78,81	21.821.619.600,53
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.1.a.3)	11.911.500.818,00	11.911.500.818,00	100,00	13.257.062.871,00
Lain-lain PAD Yang Sah	A.1.a.4)	116.881.752.000,00	81.223.248.206,47	69,49	78.774.620.247,14
PENDAPATAN TRANSFER		1.113.092.006.024,00	1.113.064.645.262,53	100,00	1.167.090.947.885,33
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		893.318.252.024,00	882.646.034.275,00	98,81	979.207.172.107,00
Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.b.1)a)	16.537.559.000,00	16.600.486.869,00	100,38	16.903.926.847,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	A.1.b.1)b)	4.761.028.000,00	4.562.140.811,00	95,82	4.898.906.124,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	A.1.b.1)c)	675.113.981.000,00	666.954.323.000,00	98,79	746.051.655.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	A.1.b.1)d)	196.905.684.024,00	194.529.083.595,00	98,79	211.352.684.136,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		131.779.311.000,00	131.779.311.000,00	100,00	109.490.811.000,00
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
Dana Penyesuaian	A.1.b.2)a)	44.575.588.000,00	44.575.588.000,00	100,00	23.194.399.000,00
Dana Desa	A.1.b.2)b)	87.203.723.000,00	87.203.723.000,00	100,00	86.296.412.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah - Lainnya		87.994.443.000,00	98.639.299.987,53	112,10	78.392.964.778,33
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	A.1.b.3)a)	55.694.443.000,00	62.801.208.587,53	112,76	71.087.575.978,33
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	A.1.b.3)b)	32.300.000.000,00	35.838.091.400,00	110,95	7.305.388.800,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		50.918.800.000,00	49.250.006.154,07	96,72	47.422.181.569,00
Pendapatan Hibah	A.1.c.1)	50.918.800.000,00	49.250.006.154,07	96,72	47.422.181.569,00
Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
BELANJA		1.403.118.756.555,00	1.308.863.107.049,03	93,28	1.243.628.921.345,72
BELANJA OPERASI		966.861.135.586,00	937.887.541.498,15	97,00	877.333.586.220,72
Belanja Pegawai	A.2.a.1)	573.471.993.040,00	567.719.215.385,00	99,00	576.171.963.989,00
Belanja Barang dan Jasa	A.2.a.2)	312.230.471.536,00	294.250.796.841,15	94,24	272.380.370.871,72
Belanja Hibah	A.2.a.3)	81.158.671.010,00	75.917.529.272,00	93,54	26.313.751.360,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.a.4)	-	-	-	2.467.500.000,00
BELANJA MODAL		433.757.620.969,00	369.026.103.780,10	85,08	365.673.135.125,00
Belanja Modal Tanah	A.2.b.1)	8.521.620.000,00	4.978.794.000,00	58,43	1.414.415.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.b.2)	59.177.416.235,00	56.330.016.936,00	95,19	49.519.511.579,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.b.3)	112.999.655.337,00	105.364.157.068,00	93,24	138.765.554.016,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.b.4)	249.068.588.397,00	198.622.067.040,10	79,75	164.421.624.475,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.b.5)	3.990.341.000,00	3.731.068.736,00	93,50	11.552.030.055,00
BELANJA TAK TERDUGA		2.500.000.000,00	1.949.461.770,78	77,98	622.200.000,00
Belanja Tak Terduga	A.2.c.	2.500.000.000,00	1.949.461.770,78	77,98	622.200.000,00
TRANSFER		172.601.840.350,00	156.813.882.252,00	90,85	163.685.858.482,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		84.408.117.350,00	68.761.015.737,00	81,46	76.543.540.300,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	A.3.a.1)	84.408.117.350,00	68.761.015.737,00	81,46	76.543.540.300,00

Lampiran 7 :Data PDRB Tahun 2011-2015

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015**
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.504.722,10	1.553.805,30	1.601.405,40	1.749.999,40	1.888.855,60
2	Pertambangan dan Penggalian	490.681,50	557.477,70	624.609,30	736.331,00	828.870,50
3	Industri Pengolahan	1.708.395,70	1.818.383,70	1.967.108,70	2.337.241,30	2.586.445,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.842,40	7.247,70	7.943,00	9.228,80	8.967,42
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9.166,20	9.829,10	10.492,40	10.807,30	10.837,20
6	Konstruksi	422.034,70	472.962,90	535.777,00	573.016,70	627.453,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	271.996,80	308.210,90	326.539,20	354.445,70	371.946,80
8	Transportasi dan Pergudangan	2.735.920,30	3.269.958,20	3.441.355,30	3.161.029,80	3.407.382,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.114,40	30.955,00	32.908,40	34.748,70	37.141,40
10	Informasi dan Komunikasi	128.321,90	131.938,50	140.731,80	143.700,50	153.273,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	114.234,60	135.374,30	142.676,80	147.007,30	153.272,97
12	Real Estate	128.479,10	138.612,90	144.706,00	150.430,90	158.704,65
13	Jasa Perusahaan	2.186,00	2.404,10	2.541,50	2.621,60	2.705,53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	339.126,60	351.473,50	361.658,80	374.002,40	399.310,25
15	Jasa Pendidikan	159.568,50	160.282,20	171.578,20	174.907,30	180.154,54
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52.647,80	59.220,90	63.927,40	69.991,70	76.290,99
17	Jasa Lainnya	35.459,90	36.314,10	36.822,90	37.714,20	39.222,77
PDRB		8.137.898,50	9.044.451,00	9.612.782,10	10.067.224,60	10.930.835,75
Laju Pertumbuhan Ekonomi			11,14	6,28	4,73	8,58

Lampiran 8 : Data PDRB Tahun 2015-2020

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.888.854,90	2.051.940,00	2.202.311,90	2.312.494	2.434.716	2.378.990
2	Pertambangan dan Penggalian	828.870,50	955.853,50	1.142.053,80	1.253.526	1.419.899	1.432.110
3	Industri Pengolahan	2.572.164,10	2.653.474,00	2.733.882,10	2.747.088	2.787.667	2.604.390
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.967,40	10.042,30	10.649,50	11.232	11.928	11.360
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.873,20	10.979,80	12.171,70	13.078	15.204	17.330
6	Konstruksi	627.453,30	675.641,70	735.098,20	807.441	950.688	1.084.870
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	371.946,80	396.964,00	419.031,60	451.107	508.099	497.270
8	Transportasi dan Pergudangan	3.407.382,90	3.917.728,60	4.175.994,60	4.541.584	4.040.990	2.604.870
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37.141,40	39.628,70	41.548,70	46.552	53.225	43.120
10	Informasi dan Komunikasi	153.273,00	160.210,90	168.702,10	179.843	190.749	214.950
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	153.637,30	169.038,20	169.505,50	176.663	189.050	196.640
12	Real Estate	158.704,60	167.671,50	178.653,90	190.656	204.729	217.650
13	Jasa Perusahaan	2.705,50	2.798,90	3.060,30	3.366	3.745	3.710
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	399.085,70	432.882,60	453.024,00	478.681	540.342	539.400
15	Jasa Pendidikan	180.154,50	187.360,70	193.918,30	207.036	224.921	231.460
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.291,00	80.796,00	84.108,70	88.463	93.743	102.680
17	Jasa Lainnya	39.222,80	40.987,80	44.603,50	49.938	56.590	52.870
PDRB		10.916.728,90	11.953.999,20	12.768.318,40	13.558.747,50	13.726.282,60	12.233.670,00
Laju Pertumbuhan PDRB		8,58	9,50	6,81	6,19	1,24	-10,87

Lampiran 9 : Tabel T

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35338	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72869	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44891	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97884	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283

Lampiran 10 : Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas 0,05 taraf signifikansi 5% atau 0,05

df untuk penyebut (N2)	nilai df (n1)														
	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27

Lampiran 11 : Hasil Analisis Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln PAD	9	24.82	26.24	25.7102	.48864
Ln DP	9	27.02	27.70	27.4213	.22913
Ln Pertumbuhan Ekonomi	9	22.93	23.34	23.1593	.15185
Valid N (listwise)	9				

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.939	.919	.04332	1.266

a. Predictors: (Constant), Ln DP, Ln PAD

b. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.173	2	.087	46.137	.000 ^b
	Residual	.011	6	.002		
	Total	.184	8			

a. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Ln DP, Ln PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.997	2.913		4.462	.004		
	Ln PAD	.235	.080	.756	2.921	.027	.152	6.585
	Ln DP	.150	.172	.227	.876	.415	.152	6.585

a. Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03751962
Most Extreme Differences	Absolute	.212
	Positive	.191
	Negative	-.212
Test Statistic		.212
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Runs Test

Unstandardized

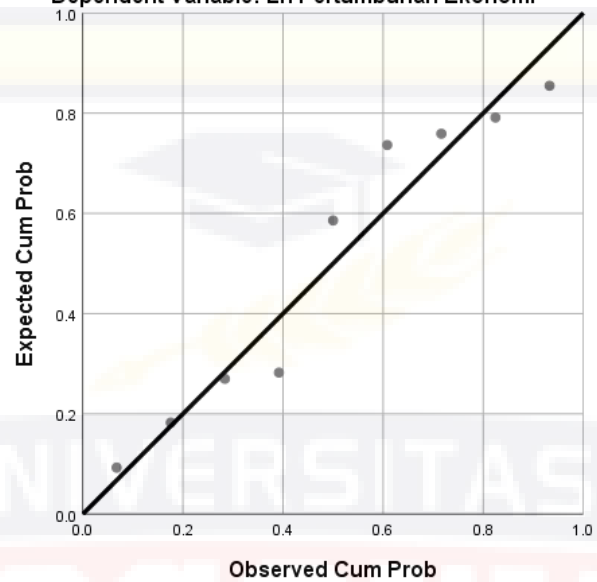
Residual

Test Value ^a	.00940
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	4
Z	-.683
Asymp. Sig. (2-tailed)	.495

- a. Median

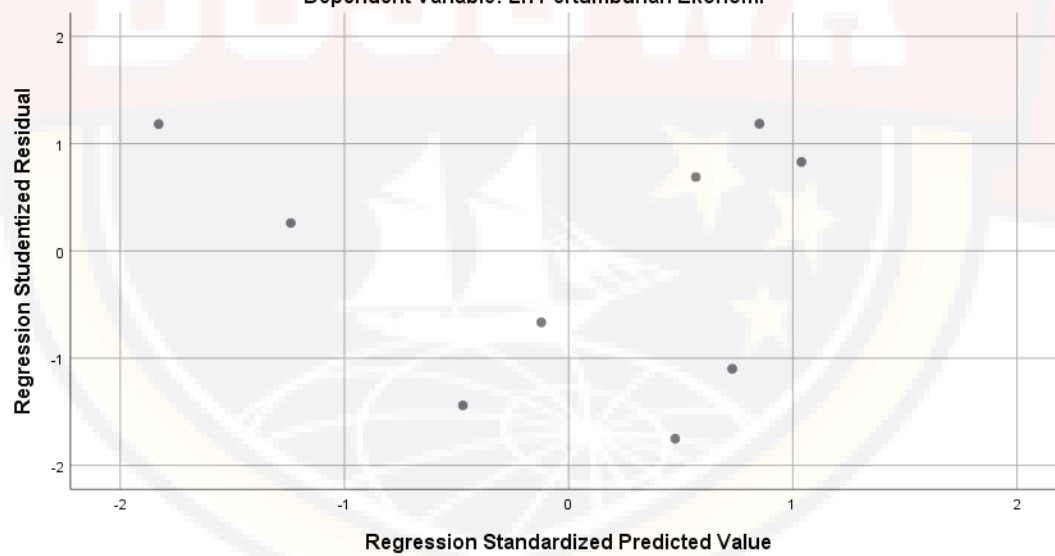
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi



Scatterplot

Dependent Variable: Ln Pertumbuhan Ekonomi



Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
 email : admin@dpmpmsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpmsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor. 37/III/IP/DPMPMPTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 39/II/REK-IP/DPMPMPTSP/2022

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : YUYUN YUNINGSIH
 Nomor Pokok : 4518011004
 Tempat/Tgl.Lahir : Maros, 11 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : MAKASSAR
 Tempat Meneliti : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/ BADAN PENDAPATAN DAERAH

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
“PENGARUH PENERIMAAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS”

Lamanya Penelitian : 14 Februari 2022 s/d 11 Maret 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 10 Februari 2022

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip 19721108 199202 1 001



Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas BOSOWA Makassar di Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Maros Prov. Sulawesi Selatan Telp. (0411)371005 Kode Pos 90511
e-mail: dpkd@maroskab.go.id website : bpkd@maroskab.go.id

Maros, 22 Februari 2022

Nomor : 070 / 114 / II / 2022

Lampiran :

Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa

Makassar

Di -

Makassar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Maros Nomor: 37/II/IP/DPMPSTP/2022, Tanggal 10 Februari 2022, Permohonan Izin Penelitian, menerangkan bahwa :

Nama : YUYUN YUNINGSIH
Tempat / Tgl. Lahir : Maros, 11 Agustus 2000
Alamat : Makassar
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 4518011004

Bahwa maksud surat tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Maros untuk melakukan Penelitian dan pengambilan data, guna menyusun Skripsi dengan judul "**PENGARUH PENERIMAAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS**" Yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2022 s/d 11 Maret 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

ANDI SAMSOPHYAN, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. : 19710903 199603 1 001

Lampiran 13 : Pengambilan Data PDRB**Lampiran 14 : Pengambilan Data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan**